

**PENGARUH ANGGARAN DAN
REALISASI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH**

(Suatu Studi Pada Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi)

Oleh :

TITI MUGIATI

NIM : 4122.5.15.21.0200

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Manajemen Keuangan
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WINAYA MUKTI
BANDUNG**

2018

**PENGARUH ANGGARAN DAN
REALISASI TERHADAP
KINERJA KEUANGAN DAERAH**

(Suatu Studi Pada Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi)

Oleh :

TITI MUGIATI

NIM : 4122.5.15.21.0200

TESIS

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Manajemen
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti

Bandung,2018

Disetujui dan disahkan Komisi Pembimbing

Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE., M.Sc
PEMBIMBING I

Dr. H. Dodi Sukmayana, SE., MM
PEMBIMBING II

H. Deden Komar Priatna, ST., SIP., MM
Dekan

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Titi Mugiati, SE
Tempat dan tanggal lahir : Banyumas, 27 Januari 1979
NPM : 4122.5.15.21.0200
Program Studi : Magister Manajemen
Judul Tesis : Pengaruh Anggaran dan Realisasi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:

- Pasal 25 ayat (2), dinyatakan bahwa : *“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya”*.
- Pasal 70, dinyatakan bahwa : *“Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana didenda paling banyak Rp. 200 juta”*.

SAYA NYATAKAN

1. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/doktor), baik di Universitas Winaya Mukti maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam setiap kutipan serta dalam daftarpustaka.
4. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Bandung, September 2018

TITI MUGIATI, SE
NPM. 4122.5.15.21.0200

ABSTRAK

Titi Mugiati, 2018, Pengaruh Anggaran dan Realisasi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Suatu Studi pada Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi), Tesis Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Program Studi Magister Manajemen, Konsentrasi Manajemen Keuangan dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE., M.Sc. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Dodi Sukmayana, SE., MM selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah baik secara parsial maupun simultan padadinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda, terhadap rasio anggaran, realisasi dan kinerja keuangan dengan sampel pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahiselama 5 tahun dari 2012-2016.

Berdasarkan hasil penelitian, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Kota Cimahi. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kababilitas dan efektivitas Pemerintah Kota Cimahi. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran dimasa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya.

Maka hasil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara parsial, anggaran pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada tahun 2012-2016.
2. Secara parsial, realisasi pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada tahun 2012-2016.
3. Secara simultan, anggaran dan realisasi pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada tahun 2012-2016.

Kata kunci : Anggaran, Realisasi, Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

ABSTRACT

Titi Mugiati, 2018, Effect of Budget and Realization of Regional Financial Performance (A Study on Producing Service in Cimahi City Government), Winaya Mukti University Graduate Program Thesis Master of Management Study Program, Financial Management Concentration under the guidance of Mr. Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE., M.Sc. as Advisor I and Mr. Dr. H. Dodi Sukmayana, SE., MM as counselor II.

The purpose of this study was to determine the effect of the budget and the realization of regional financial performance both partially and simultaneously in the producing offices in the Cimahi City Government.

The research method used in this study is a multiple regression analysis method, on the budget ratio, realization and financial performance with samples at the producing agency in the Cimahi City Government for 5 years from 2012-2016.

Based on the results of the research, the Regional Budget (APBD) is the main policy instrument for the Cimahi City Government. As a policy instrument, the APBD supports a central position in the effort to develop the capability and effectiveness of the Cimahi City Government. APBD can be used as a tool to determine the amount of income and expenditure, assist decision making and achievement of development, future expenditure authorities, sources of development of standard measures for performance evaluation, tools for motivating employees and coordination tools for all activities from various work units. The use of ratio analysis in the public sector, especially on the APBD and its realization has not been done so much that in theory there is no unanimous agreement regarding the name and rules of the rules.

Then the results of this study are as follows:

1. Partially, the budget for producing services in the Cimahi City Government has a significant effect on Regional Financial Performance in 2012-2016.
2. Partially, the realization of producing services in the Cimahi City Government has no significant effect on Regional Financial Performance in 2012-2016.
3. Simultaneously, the budget and realization of the production service in the Cimahi City Government has a significant effect on Regional Financial Performance in 2012-2016.

Keywords: Budget, Realization, Regional Financial Performance, Regional Original Revenue.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT atas karunia dan rahmatNya dan tidak lupa bantuan dari semua pihak, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul“Pengaruh Anggaran dan Realisasi terhadap Kinerja Keuangan Daerah (suatu studi padadinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi)”.Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Bandung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun akan senantiasa penulis nantikan. Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Azhar Affandi, SE., M.Sc. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Dodi Sukmayana, SE., MM selaku pembimbing Iyang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga guna memberikan bimbingan kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ai Komariah, Ir., M.S. selaku Rektor Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Bandung;
2. Bapak Dr. H. Nandan Limakrisna, Ir., M.M. selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Bandung;
3. Bapak H. Deden Komar Priatna, ST., SIP., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti Bandung;
4. Bapak H. Nandang Djunaedi selaku Wakil DekanFakultas EkonomiUniversitas Winaya Mukti Bandung;
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister Manajemen Universitas Winaya Mukti Bandung yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
6. Teman-teman yang telah membantu dalam memberikan data-data yang diperlukan sehingga selesainya usulan penelitian ini;

7. Seluruh Staf Program Magister Manajemen Universitas Winaya Mukti Bandung yang telah membantu dalam penyelesaian studi yang penulis jalankan;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Magister Manajemen Universitas Winaya Mukti Bandung Angkatan XVI.F yang telah memberikan semangat untuk terus maju.
9. Spesial terima kasihku kepada suami tercinta, kedua orang tua, anak-anak yang telah memberikan dorongan moril berupa doa, kasih sayang, perhatian dan kesabarannya selama penulis menyelesaikan studi.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini berguna bagi kita semua khususnya bagi dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi dalam penyusunan realisasi anggaran dalam upaya optimalisasi program.

Bandung, September 2018

Penulis,

TITI MUGIATI

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRACT

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... vi

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR LAMPIRAN..... viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian..... 1

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah..... 8

1.2.1 Identifikasi Masalah..... 8

1.2.2 Rumusan Masalah..... 9

1.3. Tujuan Penelitian..... 9

1.4. Kegunaan Penelitian..... 10

1.4.1 Kegunaan Teoritis (Pengembangan Ilmu)..... 10

1.4.2 Kegunaan Praktis (Operasional)..... 11

**BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS**

2.1. Kajian Pustaka.....	12
2.1.1 Manajemen Keuangan.....	12
2.1.1.1 Prinsip Manajemen Keuangan.....	18
2.1.1.2 Konsep Manajemen Keuangan.....	20
2.1.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan.....	21
2.1.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan.....	22
2.1.2 Keuangan Sektor Publik.....	23
2.1.2.1 Pengertian Keuangan Publik.....	23
2.1.2.2 Latar Belakang Konsep Keuangan Publik	24
2.1.2.3 Lingkup Keuangan Publik.....	25
2.1.3 Keuangan Daerah	25
2.1.3.1 Hubungan Antara Keuangan Daerah Dengan Keuangan Negara.....	27
2.1.3.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah.....	28
2.1.3.3 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	30
2.1.4 Anggaran Keuangan.....	33
2.1.5 Realisasi Keuangan.....	33
2.1.5 Kinerja Keuangan.....	35
2.1.5.1 Derajat Desentralisasi atau Tingkat Kinerja	40
2.1.5.2 Kinerja Keuangan Daerah.....	40
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	42

2.2. Kerangka Pemikiran.....	45
2.3. Hipotesis Penelitian.....	46

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode yang Digunakan.....	47
3.1.1 Metode Penelitian.....	47
3.1.2 Unit Observasi dan Lokasi.....	48
3.2 Operasionalisasi Variabel.....	48
3.3 Sumberdan Cara Penentuan Data	51
3.3.1 Sumber Data	51
3.3.2 Cara Penentuan Data.....	51
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis.....	52
3.5.1 Rancangan Analisis.....	55
3.5.2 Uji Hipotesis.....	62
3.5.2.1 Uji Hipotesis Parsial.....	63
3.5.2.2 Uji Hipotesis Simultan.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Deskriptif Anggaran, Realisasi dan Kinerja Keuangan Daerah.....	47
4.1.2 Uji Asumsi Klasik.....	48

4.1	Pembahasan Penelitian.....	47
-----	----------------------------	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan.....	47
-----	-----------------	----

5.2	Saran.....	48
-----	------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NomorTabel	Halaman
1.1 Laporan Pendapatan Daerah.....	4
1.2 Laporan Realisasi Anggaran.....	7
2.1 Realisasi Keuangan Daerah Otonom.....	34
2.2 Pola Hubungan Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah	42
2.3 Penelitian Terdahulu.....	42
3.1 Operasionalisasi Variabel.....	51

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Halaman
2.1. Paradigma Penelitian.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Audited) pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2012-2016

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan mengenai anggaran terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Target perencanaan anggaran yang tinggi tidak berbanding dengan realisasi anggaran yang rendah dalam kurun waktu satu tahun APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Permasalahan realisasi anggaran yang kurang efektif dan efisien tidak mencerminkan transparansi, akuntabilitas, ekonomis, efektifitas, dan efisiensi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, diperlukan juga suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu dikeluarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dengan otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pemerintahan bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama pembangunan dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan kemampuan keuangan daerah, karena kemampuan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Salah satu faktor yang dapat mendukung kinerja keuangan pemerintah dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan adalah potensi keuangan daerah, yaitu kekuatan yang ada di daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu, antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah .

Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan di daerah. Alasannya adalah bahwa semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah, maka semakin tinggi pula kualitas otonomi daerah.

Tetapi pada kenyataannya banyak daerah yang mempunyai keterbatasan dari penerimaan asli daerahnya, sehingga menyebabkan bantuan pusat berupa subsidi masih cukup dominan dalam APBD. Fenomena ketergantungan daerah terhadap pusat mempunyai implikasi fiskal yang signifikan, yaitu ketergantungan keuangan daerah kepada pusat yang sangat tinggi. Ketergantungan dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi terhadap sumbangan pemerintah pusat masih sangat besar karena peningkatan kemampuan keuangan dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum optimal. Dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi cenderung mengharapkan bantuan yang lebih besar dari tahun ke tahun karena sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat dijadikan andalan sumber penerimaan terbesar dalam APBD.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan yang berasal dari daerah sendiri, terdiri dari : (1) hasil pajak daerah; (2) hasil retribusi daerah; (3) hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang meliputi : a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d.

keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/jasa oleh Daerah. Berikut ini adalah data mengenai , Pendapatan Transfer Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Laporan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012-2016

Tahun	Anggaran (PAD)	Dana Perimbangan	Lain-lain Pendapatan yang Sah
2012	70.687.655.599,00	69.659.628.079,00	202.217.332.196,05
2013	104.157.342.742,00	54.526.738.704,00	257.913.189.359,75
2014	135.259.363.105,00	59.635.291.577,00	290.852.376.161,00
2015	145.501.600.072,99	63.740.932.316,00	314.163.126.507,00
2016	149.108.093.747,00	68.110.816.854,00	68.092.972.794,00

Sumber : Data Sekunder yang diolah (Lampiran), 2016

Padaa tabel 1.1 diatas, diketahui bahwa Dana Perimbangan dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi tahun (2012-2016) setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Hal tersebut menunjukkan kinerja kuangan di dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi masih efektif dan efisien.

Salah satu faktor untuk mengoptimalkan kinerja dimasa yang akan datang baik swasta maupun pemerintahan dapat dilakukan dengan analisis terhadap laporan keuangan. Menurut G.D (2005), laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan (Stewardship) penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya, secara umum laporan ini menyediakan informasi tentang posisi keuangan,

kinerja dan arus kas dalam periode tertentu. Laporan keuangan harus tersaji secara wajar, transparan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya ataupun pemerintah daerah lain. Sedangkan materi di dalamnya adalah kegiatan pemerintah dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan. Laporan keuangan harus mengungkapkan semua itu secara transparan sehingga mampu menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dikemukakan oleh Mahmudi (2007) laporan keuangan memuat informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi realisasi dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah

pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002:159). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2002:128), yaitu rasio kinerja keuangan (otonomi fiskal), rasio realisasi terhadap pendapatan asli daerah, rasio kinerja keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kinerja keuangan daerah ditunjukkan oleh anggaran dan realisasi.

Disamping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai realisasi otonomi daerah (otda) sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah kota untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan. Maraknya pembahasan mengenai keuangan daerah, terutama hubungannya dengan otda yang sementara berlangsung menjadikan hal ini menarik untuk dibahas. Berikut ini adalah data mengenai anggaran dan realisasi penerimaan berdasarkan penerimaan selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Cimahi
Periode 2012-2016

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)
2012	70.687.655.599,00	82.304.818.473,00
2013	104.157.342.742,00	113.968.961.131,09
2014	135.259.363.105,00	129.611.544.813,56
2015	145.501.600.072,99	157.897.806.665,44
2016	149.108.093.747,00	158.305.199.635,34

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2016

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian penerimaan setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan, hal tersebut diduga dikarenakan tingkat pengelolaan dalam keuangan masih belum optimal. Penyerapan anggaran belanja yang rendah dikarenakan tidak mendukung target anggaran di Cimahi. Melihat data tentang penyerapan anggaran disetiap tahun, rata-rata penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun dan bahkan ketika melewati triwulan kedua, realisasi belanja negara masih rendah. Sayangnya banyak instansi yang terlalu berhati-hati ketika melakukan pengeluaran anggarannya. Sehingga terkesan lambat dan tidak optimal dalam memanfaatkan waktu. Tahun anggaran yang dua belas bulan sekan-akan hanya efektif selama 5-6 bulan. Banyak satuan kerja yang baru bekerja pada triwulan kedua.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan yaitu masih rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. *Performance Based Budget* lebih menitik beratkan pada kinerja ketimbang penyerapan itu sendiri. Hanya saja, kondisi perekonomian kita saat ini

variabel dominan pendorong anggarannya adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu anggaran tersebut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membuktikan kemampuan Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola keuangan daerahnya dengan mengangkat judul **“Pengaruh Anggaran dan Realisasi Terhadap Kinerja Keuangan Daerah” (Suatu Studi Pada Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi)**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan alasan-alasan tersebut di atas, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Anggaran pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi masih belum optimal;
2. Realisasi dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi masih belum optimal;
3. Kinerja Keuangan dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi masih belum maksimal;
4. Kemampuan dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasi anggaran masih belum optimal;

5. Dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi masih mempunyai ketergantungan terhadap sumber dana ektern.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana Anggaran pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi periode 2012 s/d 2016;
2. Bagaimana realisasi pada Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi periode 2012 s/d 2016;
3. Bagaimana Kinerja Keuangan pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi periode 2012 s/d 2016;
4. Seberapa besar pengaruh anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah pada Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi, baik secara parsial maupun secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana Anggaran pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi periode 2012 s/d 2016;
2. Untuk mengetahui bagaimana realisasi dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi periode 2012 s/d 2016;
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi periode 2012 s/d 2016;

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh simultan dan parsial anggaran dan realisasi terhadap kinerja keuangan daerah pada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi periode 2012 s/d 2016.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak antara lain :

1.4.1 Kegunaan secara Teoritis (Pengembangan Ilmu)

Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam bidang manajemen keuangan, konsentrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat mendorong dilakukannya penelitian-penelitian lain yang berkaitan dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

1.4.2 Kegunaan secara Praktis (Operasional)

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi dalam mengambil langkah-langkah peningkatan pengelolaan keuangan daerah;

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadikan acuan dalam membuat kebijakan bagi dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi;
- c. Bagi pembaca hasil penelitian diharapkan dapat menambah cakrawala ilmu pengetahuan untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan manajemen keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen Keuangan

Pada dasarnya manajemen keuangan mempunyai dua unsur kata yaitu “Manajemen” dan “Keuangan”. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang sangat penting diantara fungsi-fungsi operasional perusahaan lainnya seperti Manajemen Pemasaran Produksi, Manajemen Stratejik, Manajemen Sumber Daya Manusia dan lain sebagainya.

Pengertian keuangan menurut Lawrence J. Gitman dalam *Economic Planner: 2014* menyatakan bahwa:

Finance can be defined as the art and science of managing money. Virtually all individuals and organizations earn or raise money and spend or invest money. Finance is concerned with the process, institutions, markets, and instruments involved in the transfer of money among and between individuals, businesses, and governments.

Apabila diartikan : keuangan dapat didefinisikan sebagai suatu seni dan ilmu pengetahuan dari pengelolaan uang. Sesungguhnya setiap individu dan organisasi menghasilkan uang dan membelanjakan atau

menginvestasikan uang. Keuangan berhubungan dengan proses, institusi, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam perpindahan atau transfer uang antar individu bisnis dan pemerintah.

Sedangkan pengertian manajemen keuangan menurut Arthur J. Kown, John D. Martin, J. William Petty dan David F. Scott, Jr dalam bukunya *Financial Management* (2005:4) bahwa : *Financial management is concerned with the maintenance and creation of economic value or wealth*. Apabila diartikan : Manajemen keuangan adalah mengenai pemeliharaan dan penciptaan dari nilai ekonomi atau kekayaan.

Menurut Prof. Dr. Bambang Riyanto dalam bukunya *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan* menerangkan bahwa: Manajemen keuangan adalah manajemen untuk fungsi-fungsi pembelanjaan. (Bambang Riyanto, 2011:4)

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian dari Manajemen Keuangan adalah usaha-usaha untuk menyediakan uang, dimana dengan uang tersebut perusahaan berusaha untuk memperoleh atau mendapatkan aktiva. Pada hakikatnya masalah pembelanjaan adalah menyangkut masalah keseimbangan financial di dalam perusahaan. Masalah pembelanjaan dalam suatu perusahaan atau organisasi menurut prof. Dr. Bambang Riyanto (2011:13-15) bisa dikelompokan dua macam, yaitu :

1. Pembelanjaan Pasif

Masalah pembelanjaran pasif meliputi masalah – masalah yang berhubungan dengan usaha penarikan modal, dimana masalahnya ialah bagaimana perusahaan tersebut dapat memperoleh modal yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Masalah ini dapat dibedakan antara lain:

- a. Pembelanjaan kuantitatif yaitu meliputi masalah penentuan besarnya atau kuantitas modal yang dibutuhkan yang akan ditarik;
- b. Pembelanjaan kualitatif yaitu masalah penentuan jenis (kualitas) modal yang akan ditarik , yaitu meliputi persoalan-persoalan tentang berapa lama modal akan ditarik (dari sudut likuiditas); macam modal apa yang akan di tarik (sudut solvabilitas); dan pendapatan apa yang akan diberikan kepada modal yang akan ditarik (sudut rentabilitas).

2. Pembelanjaan Aktif

Masalah pembelanjaan dapat dilihat dari sudut perusahaan yang mempunyai uang untuk diserahkan kepada perusahaan lain atau untuk ditanamkan dalam perusahaan sendiri. Pembelanjaan apabila ditinjau menurut sumbernya terbagi atas:

- a. Pembelanjaan dari luar perusahaan (External Financing), yaitu bentuk pembelanjaan dimana usaha pemenuhan dana adalah diambilkan dari sumber-sumber modal yang berada

diluar perusahaan. Pembelanjaan dari luar perusahaan terdiri dari:

1) Pembelanjaan sendiri (Equity Financing), yaitu pembelanjaan yang dijalankan dengan memenuhi kebutuhan modal yang berasal dari pemilik, peserta, dan pengambil bagian (modal saham, modal peserta, dan lain-lain), yang kemudian menjadi modal sendiri dalam perusahaan;

2) Pembelanjaan asing atau pembelanjaan dengan hutang (Debt Financing), yaitu pembelanjaan yang dijalankan dengan memenuhi kebutuhan modal yang berasal dari para kreditur (kredit dari bank, kredit dari penjual, kredit obligasi, kredit dari negara, kredit asuransi, dan lain sebagainya), yang bagi perusahaan yang bersangkutan merupakan utang atau modal pinjaman yang disertai dengan kewajiban – kewajiban tertentu.

b. Pembelanjaan dari dalam perusahaan (Interval Financing), yaitu bentuk pembelanjaan dimana pemenuhan kebutuhan modal tidak diambil alihkan dari luar perusahaan, melainkan berasal dari funds yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dari dalam perusahaan, ini berarti suatu pembelanjaan dengan kekuatan sendiri. Pembelajaran dari dalam perusahaan terdiri dari :

- 1) Pembelanjaan internal, yaitu pembelanjaan dari dalam perusahaan yang dapat dijalankan dengan menggunakan laba cabang, laba yang tidak dibagikan;
- 2) Pembelanjaan intensif, yaitu pembelanjaan dari dalam perusahaan yang dapat dijalankan dengan menggunakan penyusutan-penyusutan aktiva tetap yang sementara belum digunakan untuk mengganti aktiva tetap yang lama.

Dari uraian diatas tentang pengertian manajemen keuangan dapat ditarik kesimpulan mengenai manajemen keuangan, yaitu usaha-usaha pengelolaan secara optimal dana-dana yang akan digunakan untuk membiayai segala aktivitas yang dilakukan perusahaan. Oleh karena itu, menurut Bambang Riyanto (2011:5) seorang manajer keuangan harus mengetahui tiga tugas utama, yaitu:

1. Menyangkut tentang keputusan alokasi dana, baik yang berasal dari perusahaan maupun yang berasal dari luar perusahaan atau bentuk investasi yang bagaimana yang baik bagi perusahaan.
2. Menyangkut tentang pengambilan keputusan pembelanjaan atau pembiayaan investasi. Hal ini menyangkut tentang memperoleh dana investasi yang efisien, komposisi sumber dana yang harus dipertahankan dan penggunaan modal dari dalam atau luar.

3. Menyangkut tentang kebijakan deviden. Pada prinsipnya kebijakan deviden menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh harus dibagikan kepada pemenang saham atau ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang.

Sedangkan tujuan dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan kemakmuran pemegang saham melalui maksimalisasi nilai perusahaan.

Lingkup manajemen keuangan, meliputi keputusan investasi, sumber dana untuk jangka pendek (modal kerja) dan investasi jangka panjang (barang modal), keputusan pembiayaan untuk sumber pembiayaan (hutang dan modal), kebijaksanaan deviden yaitu distribusi laba (laba ditahan atau dividen), tujuan memaksimalkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham, dll. Lebih spesifik manajemen keuangan membahas berikut:

1. Perolehan aktiva yang dibutuhkan perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.
2. Membiayai aktivitas yang dibutuhkan berhubungan dengan penyediaan kebutuhan dana serta berbagai biaya yang timbul akibat perolehan dana tersebut.
3. Mempertahankan kombinasi sumber pembiayaan tepat dalam membiayai kebutuhan dana perusahaan yang berhubungan dengan struktur modal.
4. Pendistribusian laba yang diperoleh dari kegiatan operasional, berhubungan dengan pembiayaan sebagai dividen serta menahan dalam bentuk laba ditahan.

5. Memperhatikan trade off antara resiko dari keuntungan yang diharapkan dalam membuat keputusan keuangan.

2.1.1.1 Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan tidak hanya sekedar pencatatan akuntansi saja. Manajemen keuangan adalah bagian yang penting dan tidak bisa dianggap sebagai suatu kegiatan tersendiri yang menjadi bagian dari pekerjaan orang-orang keuangan. Manajemen keuangan dalam prakteknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau organisasi. Maka dari itu, dalam membuat sebuah sistem manajemen keuangan, kita membutuhkan prinsip-prinsip ini yang menjadi dasar diantara :

a. *Consistency* (Konsistensi)

Dalam prinsip konsistensi ini, suatu sistem serta kebijakan keuangan perusahaan haruslah konsisten, tidak berubah dari periode ke periode, namun perlu diingat bahwa sistem keuangan bukan berarti tidak boleh dilakukan penyesuaian bila ada suatu perubahan yang signifikan didalam perusahaan, pendekatan keuangan yang tidak konsisten bisa menjadi tanda bahwa ada manipulasi pada pengelolaan keuangan perusahaan.

b. *Accountability* (Akuntabilitas)

Prinsip ini adalah suatu kewajiban hukum ataupun moral, yang melekat kepada individu, kelompok ataupun perusahaan untuk memberi penjelasan bagaimana dana ataupun kewenangan yang telah diberikan kepada pihak ke-3

telah dipergunakan. Pihak-pihak harus bisa memberi penjelasan tentang penggunaan sumber daya dan apa saja yang sudah dicapai sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, agar semua tahu bagaimana kewenangan dan dana yang dimiliki itu dipergunakan.

c. *Transparancy* (tranparansi)

Manajemen harusnya terbuka terhadap pekerjaannya, memberikan informasi tentang rencana dan segala aktivitas kepada yang berkepentingan, termasuk memberikan laporan keuangan yang wajar, lengkap, tepat waktu dan akurat yang bisa diakses dengan mudah oleh yang berkepentingan, apabila tidak transparan, maka ini bisa mengindikasikan manajemen telah menyembunyikan sesuatu.

d. *Viability* (Kelangsungan Hidup)

Supaya kesehatan keuangan perusahaan terjaga, semua pengeluaran operasional ditingkat yang strategis harus disesuaikan dengan dana yang ada. Kelangsungan hidup entitas merupakan ukuran suatu tingkat kepada manajemen serta keberlanjutan keuangan perusahaan. Manajemen keuangan harus menyusun rencana keuangan dimana menunjukkan bagaimana suatu perusahaan bisa menjalankan rencana strategisnya guna memenuhi kebutuhan keuangan.

e. *Integrity* (Integritas)

Setiap individu harus memiliki tingkat integritas yang mampu dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Selain itu catatan dan laporan keuangan harus terjaga integritasnya dengan kelengkapan dan tingkat keakuratan suatu pencatatan keuangan.

f. *Stewardship* (Pengelolaan)

Manajemen keuangan harus bisa mengelola dengan mempunyai dana yang sudah didapat dan memberikan jaminan bahwa dana yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam prakteknya, manajemen bisa melakukan bisa berhati-hati dalam membuat perencanaan strategis, mengidentifikasi resiko keuangan yang ada serta menyusun dan membuat sistem pengendalian keuangan yang sesuai.

g. *Accounting Standar* (Standar Akuntansi)

Sistem akuntansi keuangan yang dipake harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan standar aturan akuntansi yang berlaku. Agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa dengan mudah dipahami dan dimengerti oleh semua pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Konsep Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan adalah manajemen mengenai fungsi keuangan, dan fungsi manajemen keuangan merupakan bagaimana mempergunakan serta menempatkan dana yang ada. Fungsi-fungsi yang ada dalam perusahaan harusnya dilaksanakan dengan baik mengingat fungsi yang ada saling berkaitan satu sama lain. Seperti telah dibahas diatas, manajemen keuangan memiliki tiga kegiatan yang utama:

1. Perolehan Dana, merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, entah itu berasal dari internal perusahaan ataupun bersumber dari eksternal perusahaan.

2. Penggunaan Dana, suatu aktivitas menggunakan atau menginventasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset.
3. Pengelolaan Aset (Aktiva), aktivitas ini adalah kegiatan yang dilakukan setelah dana didapat dan telah diinventasikan atau dialokasikan kedalam bentuk aset (aktiva), dana harus dikelola secara efektif dan efisien.

Jadi, dengan aktivitas-aktivitas diatas tersebut, dengan kata lain fungsi pengambilan keputusan manajemen keuangan adalah keputusan mengenai pendanaan, investasi dan manajemen aset (aktiva).

2.1.1.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan bertujuan memaksimalkan nilai dari perusahaan. Manajemen harus bisa menekan perputaran uang yang bisa menghindarkan dari aktivitas yang tidak diinginkan, perlu diingat tujuan utama dari suatu perusahaan adalah untuk memaksimalkan atau menambah kesejahteraan para pemilik perusahaan. Saham yang beredar adalah bukti kepemilikan, kesejahteraan para pemilik direfleksikan dari harga pasar perusahaan itu, harga perusahaan tersebut adalah buah dari keputusan manajemen mengenai keputusan untuk investasi, keputusan dalam pendanaan serta aktivitasnya dalam manage aktiva, keputusan-keputusan tersebut akan berdampak pada harga saham para pemilik perusahaan.

2.1.1.4 Fungsi Manajemen Keuangan

1. *Investment Decision* (Keputusan Investasi)

Investasi berarti penanaman modal pada aset riil ataupun aset finansial (surat berharga), keputusan investasi ini adalah suatu keputusan terhadap aset apa yang nantinya akan dikelola entitas/perusahaan. Keputusan yang strategis ini akan berpengaruh secara langsung terhadap besar kecilnya rentabilitas investasi serta aliran dana perusahaan pada masa mendatang.

2. *Financing Decision* (Fungsi Pendanaan)

Keputusan mengenai pendanaan ialah dengan mempelajari berbagai sumber dana perusahaan, dalam laporan keuangan berada dalam sisi pasiva. Keputusan ini harus memperhatikan sumber dana dengan biaya seminimal mungkin dan juga syarat yang bisa menguntungkan baik itu berasal dari interval perusahaan maupun sumber dana yang berasal dari luar perusahaan (eksternal).

3. *Dividend Decision* (Keputusan Deviden)

Dalam fungsi ini, keputusan biasanya menyangkut hal-hal seperti:

- Besaran prosentase laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas;
- Tingkat stabilitas deviden yang akan dibagikan oleh manajemen;
- Stock dividend (deviden saham);
- Stock split (pemecahan saham);
- Penarikan saham yang telah beredar.

Fungsi manajemen keuangan lainnya jika dikaitkan dengan beberapa hal di atas:

- Pengawasan terhadap biaya;

- Penetapan atas kebijakan harga;
- Peramalan laba dimasa mendatang;
- Pengukuran atau penjajakan biaya untuk modal kerja;

2.1.2 Keuangan Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian Keuangan Publik

1. Terminologi Keuangan Publik = Keuangan Negara = Keuangan Pemerintah = Aktivitas Financial Pemerintahan (kajian kita tidak termasuk aktivitas pemerintah dalam perekonomian);
2. Secara teori tidak selalu jelas subjek dari publik finance, karena tergantung bentuk negara, sistem pemerintah dan konstitusi yang mengatur kehidupan kenegaraan suatu negara.;
3. Namun di Indonesia, sesuai UU 17/2003 ditetapkan pendekatan yang digunakan untuk merumuskan keuangan negara, yakni sisi objek, sisi subjek, proses dan tujuan;
4. Keuangan negara menurut UU 17/2003 : sesuai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2.1.2.2 Latar Belakang Konsep Keuangan Publik

1. Undang-undang keuangan negara meletakkan negara sebagai penyedia layanan dasar kepada masyarakat dalam bentuk pertahanan, kesehatan, keadilan, pendidikan dan pekerjaan umum lainnya;
2. Negara dipersepsikan sebagai pemegang kekuasaan (otoritas authority) yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyediakan dan membela kepentingan masyarakat (public interest);
3. Sebagai wujud itikad baik untuk mewujudkan good governance.

2.1.2.3 Lingkup Keuangan Publik

Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh penerimaan ataupun pendapat yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah).

- Penerimaan negara (UU 17/2013) : uang yang masuk ke kas negara;
- Pendapatan negara (UU 17/2013) hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.

Keuangan publik mencakup aspek pengeluaran negara yang termasuk di dalamnya belanja publik/negara (pusat dan daerah).

- Pengeluaran negara (UU 17/2013) : uang yang keluar dari kas negara;

- Belanja negara (UU 17/2013) belanja pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2.1.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengertian keuangan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut : “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa nilai dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak daerah tersebut meliputi :

1. Hak menarik pajak daerah;
2. Hak untuk menarik retribusi daerah;
3. Hak mengadakan pinjaman;
4. Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pasar.

Sedangkan kewajiban daerah meliputi : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pengertian di atas, pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintahan daerah mengisi kas daerah. Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat sesuai dengan UUD 1945.

2.1.3.1 Hubungan Antara Keuangan Daerah dengan Keuangan Negara

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengatur sumber-sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah juga merupakan sub sistem pemerintah negara sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan negara akan mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah serta secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi dan dekonsentrasi. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran

yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sedangkan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pengalokasian anggaran.

Pelimpahan wewenang dalam rangka pelaksanaan desentralisasi saja yang merupakan sumber keuangan daerah melalui alokasi dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak merupakan sumber penerimaan APBD dan diadimistrasikan serta dipertanggungjawabkan secara terpisah dari administrasi keuangan dalam pembiayaan pelaksanaan desentralisasi.

2.1.3.2 Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 yang mengacu pada ruang lingkup keuangan negara menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, bedanya pada ruang lingkup keuangan daerah tidak ada ruang lingkup yang menyangkut kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Menurut Abdul Halim (2002:7) mengemukakan bahwa “Ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Dipihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut : “Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman, kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan daerah, pengeluaran daerah, kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau kepentingan umum”.

Bendahara daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga, barang-barang milik daerah dan tanggung jawab kepada kepala daerah. Sebagaimana halnya dengan sistem Pengurusan Keuangan Negara, pada Pengurusan Keuangan Daerah terdiri dari : Pengurus Umum (Pengurusan Administrasi) mengandung hak pengurusan serta memberikan Perintah Menagih dan Perintah Membayar. Pelaksanaan pengurusan umum ini membawa akibat pengeluaran dari mendatangkan penerimaan guna menutup pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengurusan Khusus (Pengurus Bendahara) mengandung unsur kewajiban yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan atau membayar uang atau yang disamakan dengan uang dan barang milik daerah dan selanjutnya mempertanggungjawabkan kepada kepala daerah. Akan tetapi dengan mengingat prinsip-prinsip organisasi dalam rangka realisasi dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah di daerah, maka wewenang pengurus tersebut masing-masing dilakukan secara terpisah antara

pejabat otorisator, ordinasasi dan satuan-satuan instansi yang ditunjuk sebagai bendahara.

2.1.3.3 Pengelola Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Pengertian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Perencanaan pengelolaan keuangan daerah yang harus diperhatikan dalam perencanaan adalah; penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai, penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah kepala daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah

selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.

Pelaporan dan pertanggungjawaban dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa :

- a). Laporan Realisasi Anggaran
- b). Neraca
- c). Laporan Arus Kas
- d). Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK. Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2005 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Abdul Halim (2002:9) mengemukakan bahwa : “Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus.

Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah

dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah selaku kepala pemerintahan daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala Daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa ; “Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan manfaat untuk masyarakat”. Ekonomis yang dimaksud di atas adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Menurut R.R. Kobo (2001:51) Mengemukakan bahwa : “Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik”. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

2.1.4 Anggaran Keuangan

Anggaran mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah provinsi dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui anggaran masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi-potensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase anggaran setiap komponen pendapatan dan pengeluaran, maka semakin besar kemampuan pemerintah provinsi dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode.

$$\text{Anggaran PAD} = \frac{t1 - t0}{t0}$$

(Halim,2007)

Dimana t0 = tahun awal

t1 = tahun akhir

2.1.5 Realisasi Keuangan

Realisasi ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan dengan target penerimaan (dianggarkan). Realisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan sesuai dengan yang ditargetkan. Kemampuan memperoleh dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai minimum 1 atau 100%. Namun, semakin tinggi rasio realisasi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri Nomor 590.900-327, tahun 1995 mengkategorikan

kemampuan realisasi keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat realisasi seperti terlihat pada table 2.1.

Tabel 2.1
Realisasi Keuangan Daerah Otonom

Tingkat Realisasi	Rasio Realisasi %
Sangat Efektif	> 100
Efektif	> 90 – 100
Cukup Efektif	> 80 – 90
Kurang Efektif	> 50 – 80
Tidak Efektif	≤ 50

Sumber : Kepmendagri Nomor 590.900-327, tahun 1995

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan , indikator rasio realisasi saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat rasio realisasinya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi . Rasio efisiensi dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh dengan realisasi penerimaan. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan asli daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 100%. Kedua rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

(Halim,2007)

2.1.5 Kinerja Keuangan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap daerah di Indonesia diberikan hak untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab yang dapat mendorong

perkembangan dan pembangunan Daerah. Otonomi daerah merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, merubah tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah kepada arah yang lebih baik, serta mendorong percepatan pembangunan dan anggaran ekonomi di daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana konsep dasar dari otonomi daerah adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerahnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan mereka butuhkan. Maka setiap pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki dalam menciptakan serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat menjadi sumber pembiayaan di daerah. Suatu daerah otonom akan mampu berotonomi apabila daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai porsi semakin kecil. Sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu kinerja atau kemampuan keuangan daerah dicerminkan dari adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dijadikan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan ketersediaan sumber daya keuangan yang tentunya bukan sedikit, apabila suatu daerah yang tidak memiliki dana yang cukup atau memadai tentunya memerlukan tambahan dari pihak lain dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan tersebut. Pihak lain yang dimaksud adalah suatu lembaga Perbankan, Pemerintah Pusat atau pihak asing yang peduli dengan program pembangunan suatu daerah. Realita yang terjadi umumnya pada kabupaten-kabupaten yang baru terbentuk atau baru mengalami pemekaran dari kabupaten induk, bahwa sumber daya keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pembiayaan bagi daerah cenderung menunjukkan suatu kondisi ini akan menyebabkan kinerja keuangan yang rendah serta ketergantungan terhadap sumber pembiayaan kepada pemerintah pusat masih tinggi. Ketersediaan sarana prasarana di daerah yang dapat menjadi kontribusi pendapatan asli daerah dari obyek pajak daerah dan retribusi daerah misalnya hotel dan restoran, pusat-pusat perbelanjaan dengan areal parkir yang memadai dll masih relatif terbatas. Ini merupakan fenomena yang terjadi di hampir seluruh daerah kabupaten/kota.

Ketergantungan akan sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang masih sangat tinggi oleh daerah terhadap pemerintah pusat, dapat mengindikasikan bahwa kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah untuk mengendalikan sumber keuangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi terbatas, ini merupakan problem yang dihadapi di daerah dalam upaya untuk mewujudkan kinerja keuangan yang memberikan kemampuan yang besar bagi

daerah untuk mengendalikan atau mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal sesuai kebutuhan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, kinerja yang lemah juga dapat disebabkan oleh adanya konsekuensi kebijakan yang terkandung dalam konstitusi. Dalam UUD 1945, pasal 33 menyatakan bahwa tanah, air dan segala sesuatu yang secara signifikan mempengaruhi kehidupan rakyat dikendalikan oleh pemerintah pusat, akibatnya sumber penerimaan yang strategis seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai meskipun terletak di wilayah pemerintah daerah menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya mengelola sumber pendapatan yang non strategis seperti pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran, kondisi ini mengakibatkan rendahnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

Jika Pendapatan Asli Daerah yang merupakan tulang punggung sumber pembiayaan pembangunan daerah itu mengalami kenaikan secara terus menerus akan berdampak pada peningkatan kemampuan atau kinerja sumber daya keuangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dapat dilihat dari derajat fiscal suatu daerah yaitu dengan menggunakan variabel pokok kemampuan keuangan daerah, yang selanjutnya kemampuan keuangan dapat dilihat dari rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah dan total belanja yang mencerminkan

kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan merupakan suatu kondisi dimana pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya.

Model analisis kuantitatif pertama dengan membagi total pendapatan asli daerah adalah pembilang dari rasio dimensi kinerja keuangan dengan total pendapatan yang merupakan penyebut dari rasio kinerja keuangan, analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran kuantitatif terhadap besarnya sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersumber dari total pendapatan asli daerah selama periode tertentu (satu tahun) dibandingkan dengan total pendapatan daerah (satu tahun) yang mencerminkan seberapa besarnya kinerja keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Model analisis kuantitatif kedua membagi total anggaran yang adalah pembilang dari rasio dimensi kinerja keuangan dengan total realisasi yang merupakan penyebut dari rasio kinerja keuangan, yang digunakan untuk memberikan gambaran kemampuan sumber daya keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (satu tahun) dalam membiayai belanja pemerintah daerah dari total belanja secara keseluruhan pada tahun yang sama. Semakin tinggi nilai masing-masing rasio tersebut, maka semakin besar pula kontribusi pendapatan asli daerah dalam membiayai atau mendanai segala program dan kegiatan yang diarahkan pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, hal ini mengindikasikan bahwa semakin besarnya potensi pendapatan asli daerah dapat berdampak pada semakin besar

pula tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah dan semakin kecilnya kecenderungan ketergantungan sumber-sumber pembiayaan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui inovasi yang tentunya didukung oleh ketersediaan berbagai sarana dan prasarana di daerah, misalnya mendorong penyediaan sarana prasarana yang dapat meningkatkan potensi penerimaan dari retribusi parkir, retribusi pasar, pajak hotel dll. Untuk itu yang harus dipikirkan dan dilaksanakan lebih khusus pada daerah yang memiliki sarana prasarana yang masih relative sangat terbatas dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan yang terimplementasi dalam berbagai program dan kegiatan diarahkan pada upaya mendorong peningkatan penyediaan prasarana di daerah sehingga apabila telah tersedia sarana dan prasara maka akan mendorong peningkatan terhadap objek pajak daerah maupun objek retribusi daerah yang dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan potensi pendapatan asli daerah, yang kemudian meningkatkan kinerja keuangan daerah dan berkurangnya ketergantungan sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah pusat. Peningkatan kinerja keuangan daerah ini memberikan kemampuan serta keleluasaan yang besar kepada daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya keuangan yang dimiliki secara optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan sesuai kebutuhan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5.1 Derajat desentralisasi atau tingkat kinerja

Derajat desentralisasi atau tingkat kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi maka semakin tinggi kemampuan pemerintah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Menurut Halim (2007) gambaran citra kinerja daerah dalam berotonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara sehat dengan provinsi/kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang bersangkutan.

2.1.5.2 Kinerja keuangan daerah

Kinerja ini dihitung dengan cara membandingkan jumlah realisasi dibandingkan dengan jumlah anggaran. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kinerja keuangan daerahnya. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Target Anggaran PAD}} \quad (\text{Halim,2007})$$

Secara konsepsional, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah ini akan menimbulkan perbedaan. Ada empat macam pola yang memperkenalkan “hubungan situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang nomor

33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah” (Halim;2007) antara lain :

- a. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kinerja pemerintah daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah)
- b. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kinerjanya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- d. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kinerja suatu daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan daerah dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja Keuangan	Rasio Kinerja %	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	>25% - 50%	Konsultatif
Sedang	>50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	>75% - 100%	Delegatif

Sumber: Nadeak, 2003

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian sebelumnya dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, antara lain :

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Maharani (2005) melakukan penelitian di Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja tingkat Pemerintah Provinsi Kota Batu rasio kinerja mengalami penurunan yang berarti Pemerintah Provinsi Kota Batu cenderung memiliki ketergantungan financial yang sangat tinggi kepada pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap total APBD yang masih relatif kecil dan sumber pembiayaan utama masih bersumber dari dana Perimbangan Pemerintah Pusat	Kinerja keuangan hanya dipengaruhi oleh rasio kinerja	Sama-sama meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah
2	Sakti (2010) meneliti tentang analisis perkembangan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (studi empiris di Kabupaten Sukoharjo)	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti rasio kinerja keuangan daerah, indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio anggaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan keuangan di Kabupaten Sukoharjo	Menggunakan beberapa rasio keuangan, seperti rasio kinerja keuangan daerah, indeks kemampuan rutin, rasio keserasian dan rasio anggaran	Dalam penelitian ini mengkaji realisasi penerimaan berdasarkan kinerja keuangan

		<p>di sektor keuangan masih kurang. Untuk itu diperlukan upaya untuk peningkatan , baik secara ekstensifikasi yaitu pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi potensi daerah sehingga peluang-peluang baru untuk sumber penerimaan daerah dapat dicari, sedangkan secara intensifikasi dengan memperbaiki kinerja pengelolaan pemungutan pajak.</p>		
3	<p>Yanti (2011) meneliti tentang analisis rasio sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah Jawa Barat</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat dapat dikatakan memiliki kinerja yang positif</p>	<p>Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa analisis rasio untuk mengukur indikator kinerja keuangan daerah, seperti rasio kinerja keuangan daerah, rasio realisasi dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio aktivitas (rasio keserasian), debt service coverafe ratio (DSCR) dan rasio anggaran.</p>	

4	Yuniarti (2011) meneliti tentang analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Situbondo di era otonomi daerah tahun 2001-2010	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Situbondo mengalami anggaran yang cukup signifikan. Namun rasio kemampuan keuangan daerah dan indeks kemampuan rutin masih kurang dari yang diharapkan	Dalam penelitian ini ada beberapa indikator yang digunakan sebagai alat analisis seperti rasio kemampuan keuangan daerah, rasio indeks kemampuan rutin, dan rasio anggaran	
---	---	--	--	--

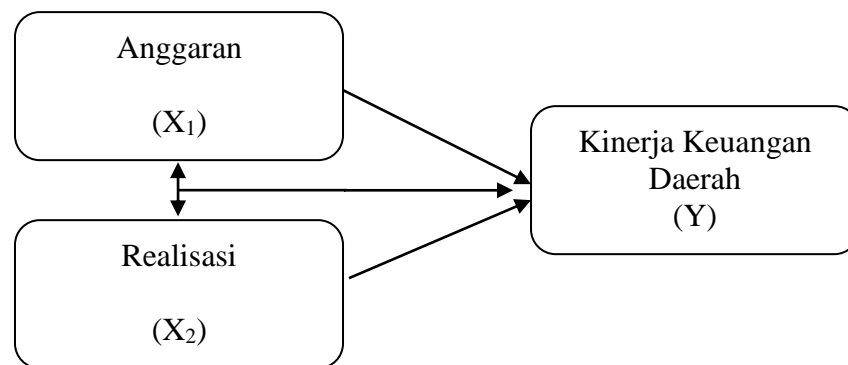
Posisi peneliti dalam penelitian ini adalah penulis mengkaji dan menganalisis mengenai kemampuan Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola keuangan daerahnya dan melihat dari Pendapatan Asli Daerah , yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah pengukuran pengelolaan atau kinerja keuangan daerah diukur melalui anggaran dan realisasi dari tahun anggaran 2012-2016

2.2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal ini ada 2 (dua) kebijakan yang sangat berperan di dalamnya, yaitu kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Kebijakan nasional dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, selain itu juga tertuang dalam PP Nomor 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara kebijakan daerah tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dilihat dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah dengan alat analisis masalah yang ada, maka dapat dibuat suatu Paradigma secara sistematis seperti berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara parsial di Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi;
2. Terdapat pengaruh realisasi terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara parsial di Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi;
3. Terdapat pengaruh anggaran dan realisasi terhadap Kinerja Keuangan Daerah secara simultan di Dinas Penghasil di Pemerintah Kota Cimahi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

3.1.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:5) metode penelitian adalah : “cara ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat ditentukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah,”

Dalam penyusunan tesis ini penulis tertarik menggunakan penelitian kuantitatif. Borg and Gall (1989) dalam bukunya sugiyono (2012:5) mengatakan penelitian kuantitatif disebut juga sebagai metode tradisional, positive, scientific, confirmatory, kuantitatif. Penelitian ini bersifat deduktif dan bertujuan untuk menguji hepotesis tidak menentukan hepotesis. Sugiyono (2012:13) penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dan analisis data bersifat kuantitatif atau statitik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. pada buku yang sama Sugiyono (2012:5) menyakatan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditentukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam bidang bisnis.

Metode kuantitatif digunakan karena masalah jelas, dan masalah tersebut merupakan penyimpangan yang seharusnya tidak boleh terjadi, antara aturan

dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktek antara rencana dan pelaksanaan. Masalah tersebut merupakan kesenjangan antara yang di harapkan dengan yang terjadi sehingga timbul rumusan masalah. Berangkat dari masalah tersebut maka membuat rumusan masalah, yang artinya merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data pengujian hipotesis menggunakan hipotesis deskriptif, assosiatif dan verifikatif. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui gambaran sistematis, factual, dan actual mengenai fakta-fakta, serta sifat dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode verifikatif merupakan metode penelitian untuk menguji jawaban-jawaban masalah atas hasil penelitian yang bersifat sementara (hipotesis) mengenai hubungan antara kedua variabel, yaitu variabel X (variable independen) dan Y (variable dependen). Terdapat variable yang dipengaruhi dan mempengaruhi, maka hubungan ini disebut hubungan kausal, yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat.

3.2 Operasionalisasi variabel

Variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu variable independen atau variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan symbol X dan variabel dependen atau terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y.

1. Variabel Bebas (X)

Variabel bebas merupakan variabel yang diduga mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Anggaran (X1), yaitu anggaran yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. (halim : 2007)
- b. Realisasi (X2), yaitu menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio realisasi, maka kemampuan daerah pun semakin baik. (halim : 2007)

2. Variabel Terikat (Y)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah (Y), yaitu menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi kinerja mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan kota) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Kinerja juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka dapat digambarkan dalam bentuk tabel operasionalisasi variable adalah sebagai berikut:

Table 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator		Skala
Variabel independen (X)	Anggaran (X1)	Anggaran mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah kota Cimahi dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode berikutnya. (Halim 2007)	Anggaran = $\frac{t1 - t0}{t0}$	Rasio
	Realisasi (X2)	Realisasi menggambarkan kemampuan pemerintah kota Cimahi dalam merealisasikan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim 2007)	Realisasi = $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}}$	Rasio
Variabel dependen (Y)	Kinerja Keuangan Daerah (y)	Kinerja menunjukkan kemampnan pemerintahan kota Cimahi dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. (Halim ; 2007)	Kinerja Keuangan Daerah = $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}}$	Rasio

3.3 Sumber dan Cara Penentuan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi. Sementara kriteria penarik sampel diambil dari Laporan Realisasi Anggaran dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi tahun 2012-2016.

3.3.2 Cara Penentuan Data

1. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam laporan realisasi anggaran dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi tahun 2012-2016 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai anggaran, realisasi dan kinerja keuangan di dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi dengan pihak-pihak yang terkait, baik dari instansi pemerintah Kota Cimahi maupun pihak lain yang dianggap kompeten dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio.

3.4 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Studi Dokumen

Nawawi (1995:133) mengemukakan studi dokumen adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen maupun buku-buku dan koran.

Studi dokumen dilakukan dengan upaya mengumpulkan data serta mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan langsung di instansi pemerintah, dalam hal ini dengan melakukan wawancara (interview) dengan pihak yang berkompeten terhadap data yang diperlukan oleh penulis serta pengumpulan data yang dianggap relevan dengan masalah penelitian.

3.5 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis

a. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Analisis deskriptif kuantitatif

Metode ini menerapkan konsep perhitungan rasio keuangan, yaitu dengan menghitung rasio keuangan dari pos-pos dalam Realisasi Anggaran yang tertuang dalam Laporan Realisasi

Anggaran tahun 2012-2016. Metode ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja dinas penghasil di Pemerintah Kota Cimahi dalam mengelola keuangan daerahnya dengan menggunakan rasio-rasio.

2. Analisis Regresi Berganda

Regresi berganda berguna untuk meramalkan pengaruh dua variable atau lebih terhadap satu variable untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antara dua buah variable bebas (X) atau lebih dengan sebuah variable terikat (Y). Analisis regresi berganda dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa kinerja keuangan daerah pada dinas penghasil Pemerintah Kota Cimahi formulasi persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \text{ (Ghozali, 2009:13)}$$

dimana :

Y : Kinerja Keuangan Daerah
a : Bilangan Konstanta
b₁-b₂ : Koefisien regresi
X₁ : Anggaran
X₂ : Realisasi
E : Variabel Pengganggu

3. Uji T atau Uji Parsial

Uji T digunakan untuk menguji pengaruh variable independen secara parsial terhadap variable dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variable independen yang terdiri atas anggaran , realisasi , dan

kinerja keuangan daerah yang merupakan variable dependennya. Pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik (Ghozali, 2009:25) sebagai berikut:

- a) Jika probabilitas $< 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ a taraf signifikansi $0,05$ maka hipotesis diterima.
- b) Jika probabilitas $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$ a taraf signifikansi $0,05$ maka hipotesis ditolak.

Pada uji T, nilai probabilitas dapat dilihat dari hasil pengolahan program SPSS pada table coefficients kolom sig atau significance.

4. Uji F atau Uji Simultan

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variable independen secara bersama-sama terhadap variable dependen dari suatu persamaan regresi dengan menggunakan hipotesis statistik. Sama halnya dengan uji hipotesis secara parsial, pengambilan keputusan secara simultan juga didasarkan pada nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil pengolahan data SPSS Statistik Parametrik (Ghozali, 2009:25) sebagai berikut :

- a) Jika probabilitas $< 0,05$ atau nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ p pada taraf signifikansi $0,05$ maka hipotesis diterima.
- b) Jika probabilitas $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada taraf signifikansi $0,05$ maka hipotesis ditolak.

Nilai probabilitas dari uji F dapat dilihat dari hasil pengolahan program SPSS pada table ANOVA kolom sig atau significance.

3.5.1 Rancangan Analisis

1. Analisis Statistik

Analisis statistik adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara variable bebas (X) dengan variable terikat (Y) analisis statistik meliputi :

a. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda. Setidaknya ada empat uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multi kolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator yang linier tidak bias dengan varian yang minimum (Best Linier Unbiased Estimator = BLUE), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Berikut ini adalah uji asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi :

1) Uji Normalitas

Menurut Imam Ghozali (2007:110) tujuan dari uji normalitas adalah sebagai berikut :

“Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan”.

Uji Statistik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam penelitian ini adalah uji normalitas atau sampel Kolmogorov-Smirnov. Hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya.

- a. Menurut Singgih Santoso (2007,p154), menjelaskan output test of normality,
 - Ada pedoman pengambilan keputusan : Angka signifikan (Sig) $> \alpha = 0,05$ maka data berdistribusi normal.
 - Angka signifikan (Sig) $< \alpha = 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Adapun cara lain untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik.

b. Menurut Singgih Santoso (2002:322) metode yang digunakan adalah pengujian secara visual dengan metode gambar normal Probability Plots dalam program SPSS yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik.

Dasar pengambilan keputusan :

- Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2005 : 91) tujuan dari multikolinearitas adalah sebagai berikut :

“Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen:.

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance value* atau dengan menggunakan *Variance Inflation Factors (VIP)* dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Nilai VIF dapat dihitung dengan rumus yaitu sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{(1-R^2_j)}$$

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *variance inflation factor (VIF)*. Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF diatas nilai 10 atau *tolerance value* dibawah 0,10. Multikolinearitas tidak terjadi bila nilai VIF dibawah nilai 10 atau *tolerance value* diatas 0,10 (Hair et al, 1995; Santoso, 2002:205)

3) Uji Autokorelasi

Menurut Tony Wikaya (2009, pl20), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- Inertia, yaitu adanya momentum yang masuk ke dalam variabel-variabel bebas yang terus menerus sehingga akan terjadi dan mempengaruhi nilai-nilai variable bebasnya.

- Terjadinya penyimpangan spesifikasi karena adanya variable-variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model.
- Bentuk fungsi yang salah.
- Adanya lags (tenggang waktu).
- Manipulasi data yang mengakibatkan data tidak akurat.

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi digunakan uji statistik Durbin-Watson dengan rumus sebagai berikut :

$$DW = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2} \quad \text{Gujarati, 2003 : 457}$$

Keterangan :

e_t = residual (selisih antara y observasi dengan y prediksi).

$e_t - e_{t-1}$ = residual satu periode sebelumnya.

Setelah nilai data DW didapat, kemudian nilai d tersebut dibandingkan dengan nilai-nilai kritis dari dL dan dU dari table statistik Durbin-Watson. Secara umum, kriteria yang digunakan adalah :

- Jika $d < 4 dL$, berarti ada autokorelasi positif.
- Jika $d > 4 dL$, berarti ada autokorelasi positif.
- Jika $dU < d < 4 - dU$, berarti tidak ada autokorelasi positif atau negatif
- Jika $dL \leq d \leq dU$ atau $4 - dU \leq d \leq 4 - dL$, pengujian tidak menyakinkan.

Apabila terdapat autokorelasi cara menanggulangi masalahnya yaitu dengan cara mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum (generalized difference equation). Selain itu juga dapat dilakukan dengan memasukan variabel lagi dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas sehingga data observasi menjadi berkutang 1.

4) Uji Heterokedastisitas

Menurut Santoso (2002 : 208) tujuan uji heterokedastisitas adalah sebagai berikut : “Uji heterokedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam regresi linier diasumsikan bahwa varians bersyarat dari E (homokedastisitas), apabila varians bersyarat untuk setiap 1, ini berarti variansnya homogen atau homokedastisitas.”

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam model regresi bisa dilihat dari pola yang terbentuk pada titik-titik yang terdapat pada grafik scatterplot.

Lebih lanjut menurut Santoso (2002 : 210) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka telah terjadi heterokedastisitas.

- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

b. Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, \dots X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Adapun persamaan regresi linier berganda adalah :

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2$$

Keterangan :

Y = Kinerja Keuangan Daerah

X₁ = Anggaran

X₂ = Realisasi

A = Intersep b₁ dan b₂ = konstanta

3.5.2 Uji Hipotesis

Hipotesis statistik merupakan pernyataan sementara tentang satu populasi atau lebih. Dalam statistika, pengujian hipotesis merupakan bagian terpenting untuk mengambil keputusan. Dengan melakukan pengujian hipotesis seorang peneliti akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis.

Hipotesis statistik merupakan dugaan atau pernyataan mengenai satu atau lebih populasi yang perlu diuji kebenarannya. Benar atau tidaknya suatu hipotesis statistik belum dapat diketahui dengan pasti, kecuali kita melakukan pengujian dengan menggunakan keseluruhan populasi. Hal ini seringkali tidak mungkin dilakukan karena perlu waktu lama dan biaya yang besar untuk meneliti seluruh populasi apabila populasinya berukuran besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengambilan sampel yang mewakili populasinya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sampel, kemudian dapat ditentukan apakah dugaan mengenai populasinya didukung oleh informasi yang

diperoleh dari data sampel atau tidak. Karena pernyataan dalam hipotesis bisa benar atau salah, ada dua hipotesis yang komplementar, yaitu : hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_1). Hipotesis nol adalah hipotesis yang akan diuji, yang berkaitan dengan parameter populasinya dan berupa pernyataan tentang nilai eksak dari parameter tersebut.

Berdasarkan informasi dari sampel, pengambilan keputusan dilakukan dengan memilih satu dari dua keputusan yaitu :

Umenolak H_0 : berarti H_0 tidak didukung oleh data

Utidak H_0 : berarti H_0 didukung oleh data

Proses untuk sampai pada suatu pilihan diantara dua keputusan itu dinamakan : pengujian hipotesis statistik.

3.5.2.1 Uji Hipotesis Parsial

Untuk menguji hipotesis, dilakukan melalui hipotesis statistik dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS versi 17 sebagai berikut :

- 1) Pengujian hipotesis variabel anggaran (X_1) terhadap kinerja Keuangan Daerah (Y).

$H_0 : \rho_{yx1} = 0$: tidak terdapat pengaruh anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah

$H_1 : \rho_{yx1} \neq 0$: terdapat pengaruh anggaran terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Adapun kriteria uji : tolak hipotesis (H_0), jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

2) Pengujian hipotesis variabel realisasi (X_2) terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Y)

$H_0 : \rho_{yx1} = 0$: tidak terdapat pengaruh realisasi terhadap Kinerja Keuangan Daerah

$H_1 : \rho_{yx1} \neq 0$: terdapat pengaruh realisasi terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Adapun kriteria uji : tolak hipotesis (H_0), jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

3.5.2.2 Uji Hipotesis Secara Simultan

Untuk menguji hipotesis tentang adanya pengaruh secara simultan dari variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel terikat Y.

$H_0 : \rho_{yx1} = \rho_{yx2}$: tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel Kinerja Keuangan Daerah, **anggaran dan realisasi terhadap variabel kinerja keuangan daerah.**

$H_1 : \rho_{yx1} \neq \rho_{yx2}$: terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari variabel Kinerja Keuangan Daerah, **anggaran dan realisasi terhadap variabel kinerja keuangan daerah**

Adapun kriteria uji : tolak hipotesis (H_0), jika $F_{hitung} > F_{tabel}$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskriptif Anggaran, Realisasi dan Kinerja Keuangan Daerah

a) Anggaran PAD

Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas :

- Anggaran pendapatan, terdiri atas
 - Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
 - Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
 - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.
- Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

- Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya

Anggaran Pemerintah Kota Cimahi dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)} = \frac{t1 - t0}{t0}$$

Hasil perhitungan anggaran PAD dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran)

Tabel 4.1
Perhitungan Anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012

No	Bulan	klasifikasi tahun 2012 (ribuan rupiah)		Presentase Anggaran PAD (%)
		t0	t1	
1	Januari	8,545,543	9,443,444	10.5
2	Februari	5,434,322	6,443,123	18.6
3	Maret	1,232,221	2,555,109	107.4
4	April	3,544,998	4,442,349	25.3
5	Mei	1,233,454	2,999,231	143.2
6	Juni	6,443,521	7,421,999	15.2
7	Juli	3,123,565	4,235,721	35.6
8	Agustus	4,222,509	5,433,291	28.7
9	September	7,234,987	8,322,855	15
10	Oktober	8,000,532	8,398,155	5
11	November	4,563,223	5,643,674	23.7
12	Desember	4,999,222	5,231,653	4.6
Total		58,578,097	70,570,604	20.5

Sumber : Data Sekunder Diolah (Lampiran)

Pada tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa anggaran PAD selama tahun 2012 paling tinggi peningkatannya di bulan Mei yakni sebesar 143.2% dan paling

rendah di bulan Desember yakni sebesar 4.6%. Dengan demikian, secara total di tahun 2012, terdapat kenaikan anggaran sebesar 20.5%

Tabel 4.2
Perhitungan Anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2013

No	Bulan	klasifikasi tahun 2013 (ribuan rupiah)		Presentase Anggaran PAD (%)
		t0	t1	
1	Januari	9,443,444	13,054,321	38.2
2	Februari	6,443,123	6,673,234	3.6
3	Maret	2,555,109	6,234,986	144
4	April	4,442,349	9,413,654	111.9
5	Mei	2,999,231	7,543,338	151.5
6	Juni	7,421,999	9,543,995	28.6
7	Juli	4,235,721	6,433,854	51.9
8	Agustus	5,433,291	6,435,855	18.5
9	September	8,322,855	9,434,654	13.4
10	Oktober	8,398,155	15,433,955	83.8
11	November	5,643,674	8,533,532	51.2
12	Desember	5,231,653	6,124,433	17.1
Total		70,570,604	104,859,811	48.6

Sumber : Data Sekunder Diolah (Lampiran)

Pada tabel 4.2 di atas, terlihat bahwa anggaran PAD selama tahun 2013 paling tinggi peningkatannya di bulan Mei yakni sebesar 151.5% dan paling rendah di bulan Februari yakni sebesar 3.6%. Dengan demikian, secara total di tahun 2013, terdapat kenaikan anggaran sebesar 48.6%

Tabel 4.3
Perhitungan Anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2014

No	Bulan	klasifikasi tahun 2014 (ribuan rupiah)		Presentase Anggaran PAD (%)
		t0	t1	
1	Januari	13,054,321	15,002,554	14.9
2	Februari	6,673,234	14,123,545	111.6
3	Maret	6,234,986	9,123,554	46.3
4	April	9,413,654	11,667,223	23.9
5	Mei	7,543,338	8,999,443	19.3
6	Juni	9,543,995	10,332,565	8.3
7	Juli	6,433,854	8,332,123	29.5
8	Agustus	6,435,855	9,444,123	46.7
9	September	9,434,654	10,566,433	12.0
10	Oktober	15,433,955	16,993,221	10.1
11	November	8,533,532	11,331,223	32.8
12	Desember	6,124,433	9,338,111	52.5
Total		104,859,811	135,254,118	29.0

Sumber : Data Sekunder Diolah (Lampiran)

Pada tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa anggaran PAD selama tahun 2014 paling tinggi peningkatannya di bulan Februari yakni sebesar 111.6% dan paling rendah di bulan September yakni sebesar 12%. Dengan demikian, secara total di tahun 2014, terdapat kenaikan anggaran sebesar 29%.

Tabel 4.4
Perhitungan Anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2015

No	Bulan	klasifikasi tahun 2015 (ribuan rupiah)		Presentase Anggaran PAD (%)
		t0	t1	
1	Januari	15,002,554	16,003,445	6.7
2	Februari	14,123,545	15,133,885	7.2
3	Maret	9,123,554	10,442,223	14.5
4	April	11,667,223	12,554,999	7.6
5	Mei	8,999,443	9,234,665	2.6
6	Juni	10,332,565	11,445,888	10.8
7	Juli	8,332,123	9,135,456	9.6
8	Agustus	9,444,123	9,773,442	3.5
9	September	10,566,433	11,033,553	4.4
10	Oktober	16,993,221	17,999,222	5.9
11	November	11,331,223	12,443,123	9.8
12	Desember	9,338,111	10,342,123	10.8
Total		135,254,118	145,542,024	7.6

Sumber : Data Sekunder Diolah (Lampiran)

Pada tabel 4.4 di atas, terlihat bahwa anggaran PAD selama tahun 2015 paling tinggi peningkatannya di bulan Maret yakni sebesar 14.5% dan paling rendah di bulan Mei yakni sebesar 2.6%. Dengan demikian, secara total di tahun 2015, terdapat kenaikan anggaran sebesar 7.6%.

Tabel 4.5
Perhitungan Anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2016

No	Bulan	klasifikasi tahun 2016 (ribuan rupiah)		Presentase Anggaran PAD (%)
		t0	t1	
1	Januari	16,003,445	17,443,212	9.0
2	Februari	15,133,885	16,333,552	7.9
3	Maret	10,442,223	11,323,432	8.4
4	April	12,554,999	13,233,665	5.4
5	Mei	9,234,665	10,321,212	11.8
6	Juni	11,445,888	12,884,323	12.6
7	Juli	9,135,456	10,241,212	12.1
8	Agustus	9,773,442	10,888,244	11.4
9	September	11,033,553	12,335,534	11.8
10	Oktober	17,999,222	19,242,432	6.9
11	November	12,443,123	13,423,545	7.9
12	Desember	10,342,123	11,004,222	6.4
Total		145,542,024	158,674,585	9.0

Sumber : Data Sekunder Diolah (Lampiran)

Pada tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa anggaran PAD selama tahun 2016 paling tinggi peningkatannya di bulan Juni yakni sebesar 12.6% dan paling rendah di bulan April yakni sebesar 5.4%. Dengan demikian, secara total di tahun 2016, terdapat kenaikan anggaran sebesar 9%.

b. Realisasi PAD

Realisasi menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Cimahi dalam merealisasikan PAD yang direncanakan di bandingkan target yang di tetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai

minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio realisasi menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Anggaran Pemerintah Kota Cimahi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Hasil perhitungan rasio realisasi PAD dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran):

Tabel 4.6
Anggaran PAD Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012-2016

Anggaran PAD di Pemerintah Daerah Kota Cimahi (ribuan rupiah)						
No	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	9,443,444	13,054,321	15,002,554	16,003,445	17,443,212
2	Februari	6,443,123	6,673,234	14,123,545	15,133,885	16,333,552
3	Maret	2,555,109	6,234,986	9,123,554	10,442,223	11,323,432
4	April	4,442,349	9,413,654	11,667,223	12,554,999	13,233,665
5	Mei	2,999,231	7,543,338	8,999,443	9,234,665	10,321,212
6	Juni	7,421,999	9,543,995	10,332,565	11,445,888	12,884,323
7	Juli	4,235,721	6,433,854	8,332,123	9,135,456	10,241,212
8	Agustus	5,433,291	6,435,855	9,444,123	9,773,442	10,888,244
9	September	8,322,855	9,434,654	10,566,433	11,033,553	12,335,534
10	Oktober	8,398,155	15,433,955	16,993,221	17,999,222	19,242,432
11	November	5,643,674	8,533,532	11,331,223	12,443,123	13,423,545
12	Desember	5,231,653	6,124,433	9,338,111	10,342,123	11,004,222
Total		70,570,604	104,859,811	135,254,118	145,542,024	158,674,585

Sumber : Data sekunder yang diolah (Lampiran)

Tabel 4.7
Realisasi PAD Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012-2016

Realisasi PAD di Pemerintah Daerah Kota Cimahi (ribuan rupiah)						
No	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	8,432,889	10,323,322	13,232,423	14,888,232	15,394,939
2	Februari	6,343,912	7,212,889	9,232,121	10,232,334	12,949,499
3	Maret	3,443,233	6,232,122	8,323,123	10,558,584	11,484,343
4	April	4,821,929	5,993,223	7,323,123	9,233,449	11,434,938
5	Mei	4,231,322	7,234,122	9,232,543	12,343,589	13,848,23
6	Juni	8,123,212	9,232,343	11,323,343	12,584,949	13,283,933
7	Juli	5,453,341	6,234,343	8,563,643	10,394,939	12,838,948
8	Agustus	6,334,921	8,234,222	10,434,232	13,343,509	14,832,934
9	September	9,553,343	12,232,122	13,332,323	15,398,992	17,394,393
10	Oktober	10,434,342	11,233,322	13,233,599	14,288,949	15,832,212
11	November	7,432,432	9,223,244	11,434,334	13,484,939	14,283,394
12	Desember	8,321,231	10,323,442	14,343,992	15,990,999	16,823,234
Total		82,926,107	103,708,716	130,008,799	152,743,464	170,401,005

Tabel 4.8
Perhitungan Efektifitas Penerimaan PAD
Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012-2016

Realisasi Penerimaan PAD di Pemerintah Daerah Kota Cimahi						
(%)						
No	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	89.3	79.1	88.2	93.0	88.3
2	Februari	98.5	108.1	65.4	67.6	79.3
3	Maret	134.8	100.0	91.2	101.1	101.4
4	April	108.5	63.7	62.8	73.5	86.4
5	Mei	141.1	95.9	102.6	133.7	134.2
6	Juni	109.4	96.7	109.6	110.0	103.1
7	Juli	128.7	96.9	102.8	113.8	125.4
8	Agustus	116.6	127.9	110.5	136.5	136.2
9	September	114.8	129.7	126.2	139.6	141.0
10	Oktober	124.2	72.8	77.9	79.4	82.3
11	November	131.7	108.1	100.9	108.4	106.4
12	Desember	159.1	168.6	153.6	154.6	152.9
Total		117.5	98.9	96.1	104.9	107.4

Pada tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa rasio penerimaan PAD Pemerintah Kota Cimahi dalam lima tahun terakhir (2012-2016) mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 8.4% (104.9% - 96.1%) dan pada tahun 2016 sebesar 2.5% (107.4%-104.9%). Sebaliknya mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 18.6% (117,5% - 98.9%), dan 2014 sebesar 2.5% (98.9% - 96.1%).

c. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah menunjukkan tingkat pencapaian hasil keuangan Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui

suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran dalam bentuk rasio keuangan. Semakin tinggi rasio kinerja daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya.

Kinerja Pemerintah Kota Cimahi dapat dihitung sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Anggaran PAD}}{\text{Anggaran PAD}}$$

Hasil perhitungan rasio kinerja keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut (berdasarkan lampiran) :

Tabel 4.9
Anggaran PAD Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012-2016

Anggaran PAD di Pemerintah Daerah Kota Cimahi (ribuan rupiah)						
No	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	9,443,444	13,054,321	15,002,554	16,003,445	17,443,212
2	Februari	6,443,123	6,673,234	14,123,545	15,133,885	16,333,552
3	Maret	2,555,109	6,234,986	9,123,554	10,442,223	11,323,432
4	April	4,442,349	9,413,654	11,667,223	12,554,999	13,233,665
5	Mei	2,999,231	7,543,338	8,999,443	9,234,665	10,321,212
6	Juni	7,421,999	9,543,995	10,332,565	11,445,888	12,884,323
7	Juli	4,235,721	6,433,854	8,332,123	9,135,456	10,241,212
8	Agustus	5,433,291	6,435,855	9,444,123	9,773,442	10,888,244
9	September	8,322,855	9,434,654	10,566,433	11,033,553	12,335,534
10	Oktober	8,398,155	15,433,955	16,993,221	17,999,222	19,242,432
11	November	5,643,674	8,533,532	11,331,223	12,443,123	13,423,545
12	Desember	5,231,653	6,124,433	9,338,111	10,342,123	11,004,222
Total		70,570,604	104,859,811	135,254,118	145,542,024	158,674,585

Sumber : Data sekunder yang diolah (Lampiran)

Tabel 4.10
Realisasi PAD Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012-2016

Realisasi PAD di Pemerintah Daerah Kota Cimahi (ribuan rupiah)						
No	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	8,432,889	10,323,322	13,232,423	14,888,232	15,394,939
2	Februari	6,343,912	7,212,889	9,232,121	10,232,334	12,949,499
3	Maret	3,443,233	6,232,122	8,323,123	10,558,584	11,484,343
4	April	4,821,929	5,993,223	7,323,123	9,233,449	11,434,938
5	Mei	4,231,322	7,234,122	9,232,543	12,343,589	13,848,238
6	Juni	8,123,212	9,232,343	11,323,343	12,584,949	13,283,933
7	Juli	5,453,341	6,234,343	8,563,643	10,394,939	12,838,948
8	Agustus	6,334,921	8,234,222	10,434,232	13,343,509	14,832,934
9	September	9,553,343	12,232,122	13,332,323	15,398,992	17,394,393
10	Oktober	10,434,342	11,233,322	13,233,599	14,288,949	15,832,212
11	November	7,432,432	9,223,244	11,434,334	13,484,939	14,283,394
12	Desember	8,321,231	10,323,442	14,343,992	15,990,999	16,823,234
	Total	82,926,107	103,708,716	130,008,799	152,743,464	170,401,005

Sumber : Data sekunder yang diolah (Lampiran)

Tabel 4.11
Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah Kota Cimahi
Tahun Anggaran 2012-2016

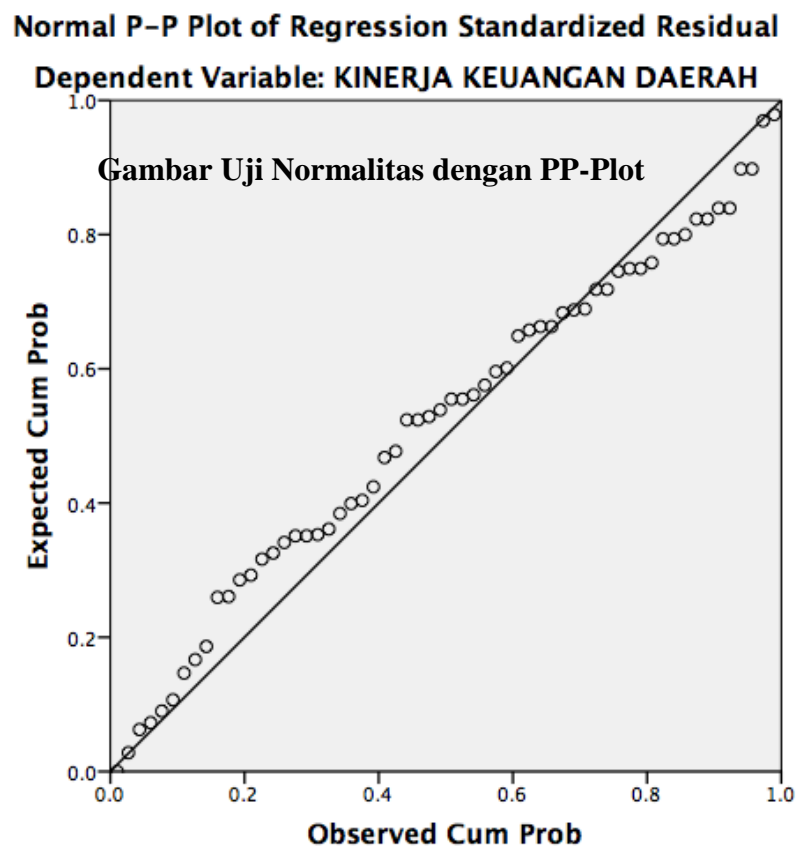
Kinerja Keuanga Daerah di Pemerintah Daerah Kota Cimahi						
(%)						
No	Bulan	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Januari	89.3	79.1	88.2	93.0	88.3
2	Februari	98.5	108.1	65.4	67.6	79.3
3	Maret	134.8	100.0	91.2	101.1	101.4
4	April	108.5	63.7	62.8	73.5	86.4
5	Mei	141.1	95.9	102.6	133.7	134.2
6	Juni	109.4	96.7	109.6	110.0	103.1
7	Juli	128.7	96.9	102.8	113.8	125.4
8	Agustus	116.6	127.9	110.5	136.5	136.2
9	September	114.8	129.7	126.2	139.6	141.0
10	Oktober	124.2	72.8	77.9	79.4	82.3
11	November	131.7	108.1	100.9	108.4	106.4
12	Desember	159.1	168.6	153.6	154.6	152.9
Total		117.5	98.9	96.1	104.9	107.4

Pada tabel 4.11 di atas, dapat dilihat bahwa rasio Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Cimahi dalam lima tahun terakhir (2012-2016) mengalami kenaikan pada tahun 2015 sebesar 8.4% (104.9% - 96.1%) dan pada tahun 2016 sebesar 2.5% (107.4%-104.9%). Sebaliknya mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 18.6% (117,5% - 98.9%), dan 2014 sebesar 2.5% (98.9% - 96.1%).

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Analisis grafik adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.



Pada gambar grafik normal probability plot di atas, dapat dilihat bahwa titik-titik (data residu) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi yang akan dibentuk, memiliki residu yang berdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil pengujian secara visual yang tersaji pada histogram dan grafik normal probability

plot di atas, dapat digunakan uji kolmogorov-smirnov. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut,

H₀: Data berdistribusi normal

H₁: Data tidak berdistribusi normal

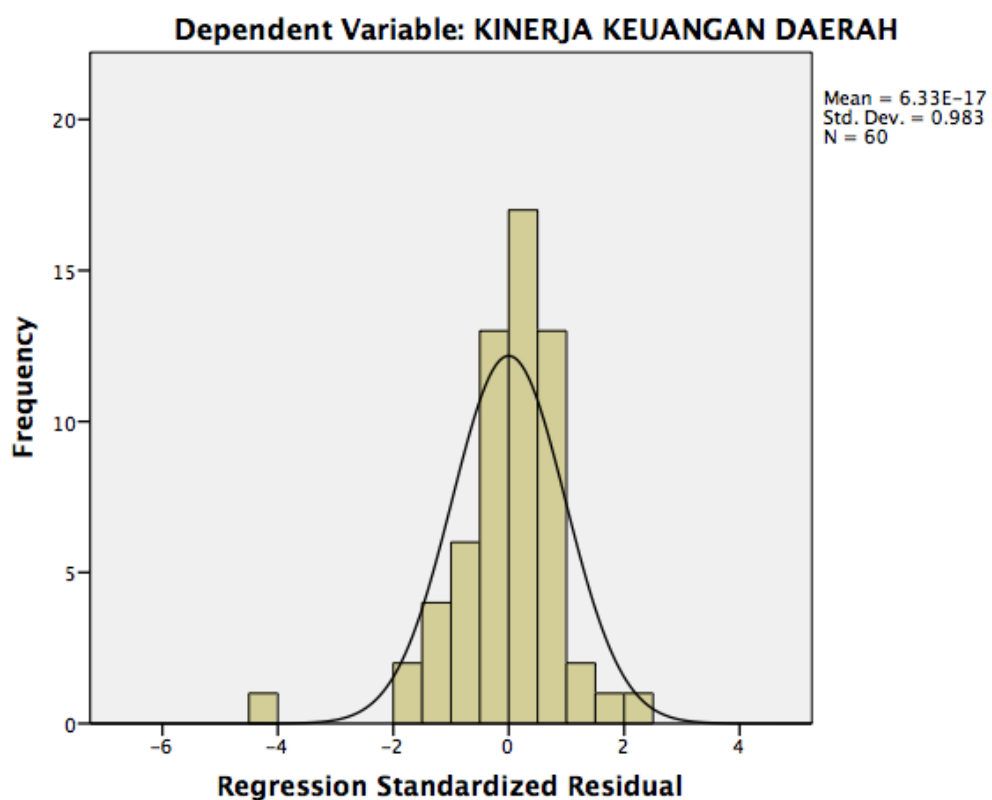
$\alpha = 5\%$

Kriteria uji: H₀ ditolak apabila nilai p-value < α

Dengan menggunakan program IBM SPSS versi 23 diperoleh hasil *uji kolmogorof-smirnof* (K-S) satu sampel sebagai berikut:

Hasil Pengujian Normalitas Data

Histogram



Berdasarkan histogram ujinormalitas terlihat bahwa gambar menyerupai bentuk lonceng sempurna. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Untuk mendeteksi masalah multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF. Apabila nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari masalah multikolinieritas. Uji multikolinieritas pada penelitian ini bisa dilihat sebagai berikut:

**Tabel Uji Multikolinieritas
Coefficients^a**

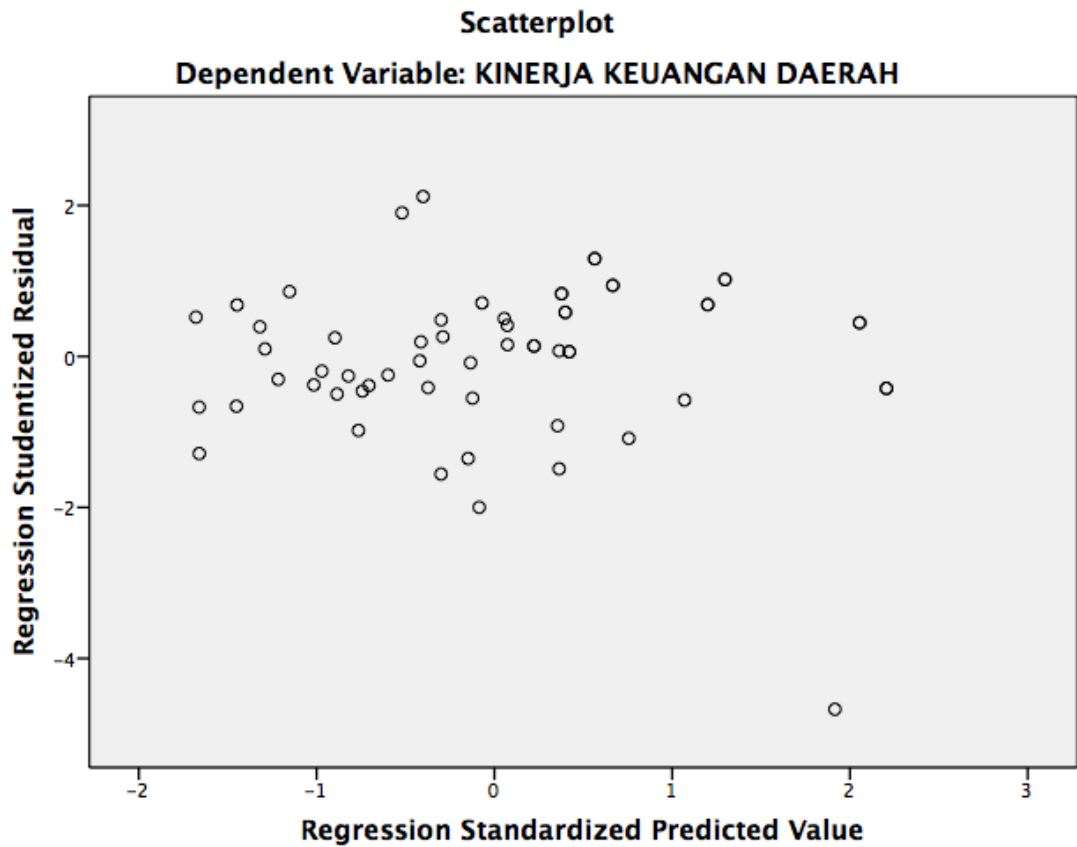
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.962	5.056		1.586	.006		
Anggaran	1.134	.090	.651	8.544	.000	.688	1.557
Realisasi	1.166	.103	.309	3.608	.000	.688	1.557

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa keempat variabel independent tersebut memiliki nilai VIF di bawah batas yang telah ditetapkan yaitu sebesar 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas antar variabel bebas dalam model.

3. Heteroskedastisitas

Gambar berikut digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas:



Gambar Uji Heteroskedastisitas Dengan Scatterplot

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalam model tidak terdapat heterokedastisitas karena pada gambar tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa dalam model, variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain sama atau konstan. Sehingga asumsi tidak adanya heteroskedastisitas atau adanya homoskedastisitas sudah terpenuhi untuk persamaan regresi.

4. Model Regresi Berganda

Model regresi berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Dimana :

Y = Kinerja Keuangan

a = konstanta

X₁ = Anggaran

X₂ = Realisasi

b₁,...b₂ = koefisien regresi

ε = *error term*

Dengan menggunakan bantuan aplikasi program SPSS, didapat output hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut:

**Tabel Koefisien Regresi
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.962	5.056		1.586	.006		
ANGGARAN	1.134	.090	.651	8.544	.000	.688	1.557
REALISASI	1.166	.103	.309	3.608	.000	.688	1.557

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH

Sehingga dapat dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.962 + 1.134(X_1) + 1.166(X_2)$$

Persamaan dari analisis regresi berganda yang tersaji di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 2.962 menunjukkan rata-rata rasio Kinerja Keuangan jika Anggaran dan Realisasi bernilai nol.
- b) Koefisien regresi untuk variabel Anggaran (X_1) adalah 1.134 yang menunjukkan besar perubahan rata-rata rasio Kinerja Keuangan yang dipengaruhi oleh Anggaran, tanda negatif menunjukkan pengaruh yang terjadi adalah berlawanan artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel Anggaran sebesar 1 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan, maka Kinerja Keuangan diprediksikan akan menurun sebesar 1.134 satuan.
- c) Koefisien regresi untuk variabel Realisasi (X_2) adalah 1.166 yang menunjukkan besar perubahan rata-rata rasio Kinerja Keuangan yang dipengaruhi oleh Realisasi, tanda negatif menunjukkan pengaruh yang terjadi adalah berlawanan artinya setiap terjadi peningkatan pada variabel Realisasi sebesar 1 satuan dan variabel lainnya dianggap konstan, maka Kinerja Keuangan diprediksikan akan menurun sebesar 1.166 satuan.

5. Analisis Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan Koefisien Determinasi penelitian ini dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859 ^a	.738	.728	4.83547	1.241

a. Predictors: (Constant), REALISASI, ANGGARAN

b. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH

Berdasar output SPSS tampak bahwa dari hasil perhitungan diperoleh Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.738. Dengan kata lain hal ini menunjukkan bahwa besar presentase variasi Kinerja Keuangan yang bisa dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel bebas yaitu Anggaran dan Realisasi sebesar 73.8%, sedangkan sisanya ($1-R^2$) sebesar 26.3% dijelaskan oleh sebab-sebab lain diluar model.

6. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (f-test)

Adapun uji keberartian regresi dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS adalah sebagai berikut:

**Tabel Hasi Uji Keberartian Regresi
ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3744.759	2	1872.379	80.079	.000 ^b
	Residual	1332.758	57	23.382		
	Total	5077.517	59			

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH

b. Predictors: (Constant), REALISASI, ANGGARAN

Berdasarkan Tabel di atas didapat nilai F_{hitung} sebesar 80.079 maka dengan $\alpha=0.05$ (5%) serta derajat kebebasan $df_1=k=2$ dan $df_2=n-(k+1) =60-(2+1) =57$, maka didapat $F_{tabel}=3.354$, sehingga nilai F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($80.079 > 3.354$) atau dapat dilihat dari nilai signifikansi dimana nilai sig. sebesar $0.000 < \alpha=0.05$ (5%). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Anggaran dan Realisasi secara simultan terhadap Kinerja Keuangan

b. Uji Parsial (t-test)

Adapun uji keberartian koefisien regresi dalam penelitian ini menggunakan *software* SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Koefisien Regresi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.962	5.056		1.586	.006		
ANGGARAN	1.134	.090	.651	8.544	.000	.688	1.557
REALISASI	1.166	.103	.309	3.608	.000	.688	1.557

a. Dependent Variable: KINERJA KEUANGAN DAERAH

Tingkat signifikansi (α) sebesar 5% dan derajat kebebasan $df = (n-1) = 30-1 = 27$ didapati nilai t_{tabel} dari nilai t_{tabel} distribusi t dua pihak sebesar ± 2.045 . Untuk memudahkan memahami kriteria pengujian, nilai t_{hitung} dan t_{tabel} dibandingkan.

4.2 Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Anggaran terhadap Kinerja Keuangan

Untuk hipotesis pertama yaitu pengaruh Anggaran terhadap Kinerja Keuangan diperoleh bahwa nilai t_{hitung} sebesar 8.544 dengan t_{tabel} sebesar 1.134, maka nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ yaitu $8.544 > 1.134$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi dimana nilai sig. sebesar $0.000 > \alpha = 0.05$ (5%) sehingga berada dalam daerah penerimaan H_0 , artinya Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2. Pengaruh Realisasi terhadap Kinerja Keuangan

Untuk hipotesis kedua yaitu pengaruh Realisasi terhadap Kinerja Keuangan diperoleh bahwa nilai t_{hitung} sebesar 3.608 dengan t_{tabel} sebesar 1.166, maka nilai $-t_{hitung} > -t_{tabel}$ yaitu $3.608 > 1.166$ atau dapat dilihat dari nilai signifikansi dimana nilai sig. sebesar $0.000 > \alpha = 0.05$ (5%), sehingga berada dalam daerah penerimaan H_0 , artinya Realisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

a. Pengaruh Anggaran PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh pertumbuhan terhadap kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan program SPSS diperoleh thitung sebesar 8.544 dan ttabel sebesar 1.134 dengan nilai signifikansi 0,00. Karena thitung > ttabel dan nilai probabilitasnya < 0,05, maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran PAD berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

b. Pengaruh Realisasi PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, pengaruh efektifitas terhadap kemandirian Keuangan Daerah dengan menggunakan program SPSS diperoleh thitung sebesar 3.698 dan ttabel sebesar 1.166 dengan nilai signifikansi 0,148. Karena thitung < ttabel dan nilai probabilitasnya > 0,0, maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

c. Pengaruh Anggaran dan Realisasi PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Sementara itu, kinerja Pemerintah Kota Cimahi cukup dinamis dengan adanya kenaikan dan penurunan dalam lima tahun terakhir (2012-2016). Meskipun demikian, Pemerintah Kota Cimahi dapat terus meningkatkan kinerja keuangan daerahnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan 9 (sembilan) sektor usaha yang dimilikinya, yaitu: pertanian dan penggalian; industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; angkutan dan komunikasi; keuangan; persewaan dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa lainnya.

Sedangkan secara simultan, dapat diketahui bahwa variabel independen yang digunakan, yaitu anggaran (X1), realisasi (X2), berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Keuangan Daerah (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai Fhitung sebesar 80.079 dengan tingkat signifikansi yang digunakan, yaitu 00.00. Nilai R Square sebesar 0.738 menunjukkan bahwa kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu anggaran dan realisasi PAD sebesar 73.8%. Sedangkan sisanya, 26.2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Anggaran PAD Pemerintah Kota Cimahi meningkat terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada lima tahun terakhir (2012 – 2016).

Realisasi PAD Pemerintah Kota Cimahi tidak mengalami peningkatan (tetap) terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada lima tahun terakhir (2012–2016).

Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Cimahi dalam lima tahun terakhir baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan anggaran PAD dan realisasi PAD.

Anggaran dan realisasi PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada lima tahun terakhir (2012–2016).

Secara parsial anggaran PAD berpengaruh signifikan dan realisasi PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Secara simultan Anggaran PAD dan Realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis kinerja keuangan Pemerintah Kota Cimahi serta beberapa kesimpulan yang telah dibuat, maka penelitian dapat memberikan saran-saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kinerja keuangannya, antara lain:

Penelitian menyarankan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat menggunakan analisis keuangan dengan baik agar anggaran PAD terus meningkat dengan baik.

Penelitian menyarankan Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat meningkatkan realisasi PAD tahun demi tahun dengan lebih baik lagi

Penelitian menyarankan Pemerintah Daerah Kota Cimahi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, baik itu dengan memberikan bimbingan teknis dan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah ataupun dengan mengoptimalkan sumber PAD yang ada maupun yang belum diolah.

Untuk penelitian selanjutnya, diusahakan agar sampel penelitian yang diambil dibedakan dari penelitian ini. Mungkin dengan berbedanya sampel penelitian yang diambil, maka variable rasio anggaran dan rasio realisasi PAD dapat berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Arthur J. Keown, David F. Scott, Jr, John D. Martin, J. William Petty, 2005, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,

Gede Edy Prasetya, 2005, Penyusunan&Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta ANDI,

Ghozali, Imam, 2009, Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

Gitman, Lawrence J. dan Chad J. Zutter. 2014, Principles of Managerial Finance: Brief, Edisi kelima, Boston: Pearson Education,

Gujarati, Damadar, 2003, Ekonometri Dasar, Terjemahan: Sumarno Zain, Jakarta: Erlangga,

Halim, Abdul, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah Jakarta: Salemba Empat,

Mahmudi, 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Yogyakarta Andi,

Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta Andi,

Nawawi, H. 1995, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta, Gajah Mada University Press,

-----, 2003, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Jakarta,

-----, 2004, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah, Jakarta,

-----, 2004, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Jakarta,

-----, 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Jakarta,

-----, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta,

-----, 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta,

-----, 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta,

-----, 2014, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta,

Riyanto, Bambang, Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan, Edisi 4, Yogyakarta, BPFE, 2011,

Singgih Santoso, 2002, SPSS Versi 17 Cetakan Kedua Jakarta: Gramedia,

Singgih Santoso, 2007, Total Quality Management (TQM) dan Six Sigma, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,

Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B, Bandung: Alfabeta,

Tony Wijaya, (2009), Analisis Structural Equation Modelling Untuk Penelitian Menggunakan AMOS, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta,

Kabo, Y.R. 2001, Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, Standar Akuntansi Keuangan, Penerbit Salemba Empat, Jakarta,

Maharani, 2005, Analisis Kinerja Keuangan Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu, academia.ed,

<http://Academia.edu>, 2015 Penelitian sebelumnya mengenai kinerja keuangan daerah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : TITI MUGIATI, SE

TEMPAT/TGL LAHIR : BANYUMAS, 27 JANUARI 1979

AGAMA : ISLAM

PEKERJAAN : PNS DINAS PENDIDIKAN

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

ALAMAT : KOMPLEK GRIYA CIBODAS NOMOR 22 RT 01 RW 015

KELURAHAN UTAMA KECAMATAN CIMAHI SELATAN

RIWAYAT PENDIDIKAN : 1. SDN KARANGENDEP 1

2. SLTPN 1 PATIKRAJA

3. SMKN 1 PURWOKERTO

4. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PURWOKERTO

5. UNIVERSITAS NASIONAL PASIM

LAMPIRAN